



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, penyusunan RKA-SKPD disesuaikan dengan prestasi kerja yang diantaranya didasarkan pada standard satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman dan standardisasi perjalanan dinas Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2004 Nomor 06 Seri E).


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEDOMAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pejabat adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan pejabat struktural pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah merupakan pihak yang dibiayai kegiatan perjalanan dinas nya baik ke dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri dan untuk pembiayaannya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam Peraturan Bupati ini. 

6. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
7. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
8. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Perhitungan SPPD rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
10. Pejabat adalah Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
11. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomat.
12. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
13. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
15. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Laporan Hasil Kegiatan adalah laporan hasil kegiatan setelah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah maupun perjalanan luar negeri. 

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah.
- b. *Perjalanan dinas luar Daerah.*
- c. Perjalanan dinas luar Negeri .

Bagian Pertama

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pasal3

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di *luar wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.*
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/perintah dari atasannya dan pejabat yang berwenang melalui penerbitan Surat Tugas dan SPPD.

Pasal4

- (1) Dalam hal penerbitan surat tugas dan SPPD harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan./perintah atasannya.

- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
- a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang bersangkutan satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Bagian Kedua Penjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri merupakan perjalanan yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rangka :
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila tidak ada tugas yang sangat mendesak di dalam negeri dan di dalam Daerah antara lain :
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Pemilihan presiden dan wakil presiden;
 - d. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Pemerintah; a.,

- b. Paspør Dinas;
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan.
- (2) Selain Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan :
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Tata cara pengurusan dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilaksanakan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
- a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal – hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. *Du*

Pasal 8

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Uang transport;
 - b. Uang penginapan;
 - c. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - d. Uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standardisasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pejabat yang menjabat sebagai pelaksana tugas dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, penghitungan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Standarisasi tertinggi biaya perjalanan dinas luar negeri adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per US\$1 (satu dolar Amerika Serikat). Namun dalam menghitung biaya riil perjalanan dinas luar negeri dihitung berdasarkan keadaan kurs dolar Amerika Serikat (US\$) pada saat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan ketentuan penghitungan biaya riil tidak boleh melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. *Sm*

Pasal 10

Biaya transport merupakan biaya yang diperlukan untuk :

- a. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
- b. Retribusi yang dipungut di terminal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.

Pasal 11

- (1) Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan nyata (at cost).
- (2) Khusus transport perjalanan dinas antar pulau yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang mewakilinya dengan menggunakan sewa speed boat diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 12

Uang penginapan, uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 13

Biaya representasi hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, dan Pejabat Struktural Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas. *du*

- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9. (contoh format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini)
- (3) Setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan perhitungan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung berdasarkan seluruh bukti pengeluaran yang sah atas biaya perjalanan dinas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Dalam hal kelebihan pembayaran biaya transport perjalanan dinas luar daerah, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai tidak tetap wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran dan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (5) Dalam hal kekurangan pembayaran biaya transport dan penginapan perjalanan dinas luar daerah, atas persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB IV KLASIFIKASI PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Klasifikasi Pemberian Biaya Perjalanan Dinas baik transport maupun uang harian diatur sebagai berikut:

1. Klasifikasi biaya transportasi pesawat udara diatur sebagai berikut:
 - a. Tiket Pesawat Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Sekretaris Daerah, klasifikasi bisnis (business Class), Kecuali Perjalanan Luar Negeri dengan Klasifikasi Eksekutif (Eksekutif Class);
 - b. Tiket Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan ADC/ Security Tiket Pesawat klasifikasi Published (Ekonomi), Kecuali Perjalanan Luar Negeri Untuk PNS golongan IVc Keatas dan Pejabat Eselon II, tiket Pesawat Klasifikasi Bisnis.
2. Klasifikasi Biaya Transportasi Kapal Laut diatur sebagai berikut:
 - a. Tiket Kapal Laut untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II klasifikasi bisnis (business Class);

3. Menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri;
4. Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas. (contoh kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini).

Pasal 18


Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport

- a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
- b. Tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
- c. Tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus;
- d. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

Pasal 19

- (1) Bila bukti-bukti sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diperoleh, maka Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas dapat membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut dengan ditanda tangani yang bersangkutan dan disetujui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. (contoh format daftar pengeluaran riil sebagaimana yercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini).
- (2) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 20

Pedoman dan standardiasasi Biaya Perjalanan Dinas ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun biaya kegiatan Perjalanan Dinas dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap Tahun Anggaran 2011, Keputusan Bupati Nomor 118 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2011, Keputusan Bupati Nomor 119 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2011, Keputusan Bupati Nomor 125 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 26 Oktober 2011

Pt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
WAKIL BUPATI,



COSTANTINE GANGGALI

III. PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORT	PENGINAPAN	UANG	MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU	REPREGENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Melonguane (di luar wilayah Mala dan Melonguane)							
	ESELON II a	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000	425,000	175,000
	ESELON I b	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000	375,000	125,000
	ESELON III a	300,000	225,000	225,000	200,000	200,000	350,000	100,000
	ESELON III b	300,000	200,000	200,000	175,000	175,000	325,000	
	ESELON IV	300,000	175,000	175,000	150,000	150,000	300,000	
	STAF GOLONGAN IV	300,000	150,000	150,000	125,000	125,000	275,000	
	STAF GOLONGAN III	300,000	150,000	125,000	125,000	125,000	250,000	
	STAF GOLONGAN II	300,000	150,000	125,000	100,000	100,000	225,000	
2.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Lirung, Beo dan Beo Selatan							
	ESELON II a	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	425,000	175,000
	ESELON II b	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	375,000	125,000
	ESELON III a	350,000	225,000	225,000	200,000	200,000	350,000	100,000
	ESELON III b	350,000	200,000	200,000	175,000	175,000	325,000	
	ESELON IV	350,000	175,000	175,000	150,000	150,000	300,000	
	STAF GOLONGAN IV	350,000	150,000	150,000	125,000	125,000	275,000	
	STAF GOLONGAN III	350,000	150,000	125,000	125,000	125,000	250,000	
	STAF GOLONGAN II	350,000	150,000	125,000	100,000	100,000	225,000	
3.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Melonguane Timur dan Pulutan							
	ESELON II a	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000	525,000	175,000
	ESELON I b	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000	475,000	125,000
	ESELON III a	400,000	225,000	225,000	200,000	200,000	450,000	100,000
	ESELON III b	400,000	200,000	200,000	175,000	175,000	425,000	
	ESELON IV	400,000	175,000	175,000	150,000	150,000	400,000	
	STAF GOLONGAN IV	400,000	150,000	150,000	125,000	125,000	375,000	
	STAF GOLONGAN III	400,000	150,000	125,000	125,000	125,000	350,000	
	STAF GOLONGAN II	400,000	150,000	125,000	100,000	100,000	325,000	
4.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Moronge, Salibabu dan Kalongan							
	ESELON II a	450,000	250,000	250,000	250,000	250,000	525,000	
	ESELON I b	450,000	250,000	250,000	250,000	250,000	475,000	
	ESELON III a	450,000	225,000	225,000	200,000	200,000	450,000	
	ESELON III b	450,000	200,000	200,000	175,000	175,000	425,000	
	ESELON IV	450,000	175,000	175,000	150,000	150,000	400,000	
	STAF GOLONGAN IV	450,000	150,000	150,000	125,000	125,000	375,000	
	STAF GOLONGAN III	450,000	150,000	125,000	125,000	125,000	350,000	
	STAF GOLONGAN II	450,000	150,000	125,000	100,000	100,000	325,000	
5.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Beo Utara dan Rainis							
	ESELON II a	500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	525,000	
	ESELON I b	500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	475,000	
	ESELON III a	500,000	225,000	225,000	200,000	200,000	450,000	
	ESELON III b	500,000	200,000	200,000	175,000	175,000	425,000	
	ESELON IV	500,000	175,000	175,000	150,000	150,000	400,000	
	STAF GOLONGAN IV	500,000	150,000	150,000	125,000	125,000	375,000	
	STAF GOLONGAN III	500,000	150,000	125,000	125,000	125,000	350,000	
	STAF GOLONGAN II	500,000	150,000	125,000	100,000	100,000	325,000	

1	2	3	4	5	5	7	8
6.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Essang dan EssangSelatan						
	ESELON II a	600,000	250,000	250,000	250,000	675,000	175,000
	ESELON II b	600,000	250,000	250,000	250,000	625,000	125,000
	ESELON III a	600,000	225,000	225,000	200,000	575,000	100,000
	ESELON III b	600,000	200,000	200,000	175,000	550,000	
	ESELON IV	600,000	175,000	175,000	150,000	525,000	
	STAF GOLONGAN IV	600,000	150,000	150,000	125,000	500,000	
	STAF GOLONGAN III	600,000	150,000	125,000	125,000	475,000	
	STAF GOLONGAN II	600,000	150,000	125,000	100,000	450,000	
7.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Gemeh dan Tampanamma						
	ESELON II a	800,000	250,000	250,000	250,000	675,000	175,000
	ESELON II b	800,000	250,000	250,000	250,000	625,000	125,000
	ESELON III a	800,000	225,000	225,000	200,000	575,000	100,000
	ESELON III b	800,000	200,000	200,000	175,000	550,000	
	ESELON IV	800,000	175,000	175,000	150,000	525,000	
	STAF GOLONGAN IV	800,000	150,000	150,000	125,000	500,000	
	STAF GOLONGAN III	800,000	150,000	125,000	125,000	475,000	
	STAF GOLONGAN II	800,000	150,000	125,000	100,000	450,000	
8.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kabarain dan Damau						
	ESELON II a	1,000,000	250,000	250,000	250,000	675,000	175,000
	ESELON II b	1,000,000	250,000	250,000	250,000	625,000	125,000
	ESELON III a	1,000,000	225,000	225,000	200,000	575,000	100,000
	ESELON III b	1,000,000	200,000	200,000	175,000	550,000	
	ESELON IV	1,000,000	175,000	175,000	150,000	525,000	
	STAF GOLONGAN IV	1,000,000	150,000	150,000	125,000	500,000	
	STAF GOLONGAN III	1,000,000	150,000	125,000	125,000	475,000	
	STAF GOLONGAN II	1,000,000	150,000	100,000	100,000	450,000	
9.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Nanusa						
	ESELON II a	1,200,000	250,000	250,000	750,000	675,000	175,000
	ESELON II b	1,100,000	250,000	250,000	750,000	625,000	125,000
	ESELON III a	950,000	225,000	225,000	650,000	575,000	100,000
	ESELON III b	900,000	200,000	200,000	550,000	550,000	
	ESELON IV	800,000	175,000	175,000	500,000	525,000	
	STAF GOLONGAN IV	700,000	150,000	150,000	450,000	500,000	
	STAF GOLONGAN III	675,000	150,000	125,000	450,000	475,000	
	STAF GOLONGAN II	650,000	125,000	125,000	400,000	450,000	
10.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan Miangas						
	ESELON II a	1,500,000	250,000	250,000		675,000	175,000
	ESELON II b	1,250,000	250,000	250,000		625,000	125,000
	ESELON III a	1,100,000	225,000	225,000		575,000	100,000
	ESELON III b	1,000,000	200,000	200,000		550,000	
	ESELON IV	900,000	175,000	175,000		525,000	
	STAF GOLONGAN IV	800,000	150,000	150,000		500,000	
	STAF GOLONGAN III	750,000	150,000	125,000		475,000	
	STAF GOLONGAN II	700,000	150,000	125,000		450,000	

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORT	PENGNAHAN	LAJANG	MAKAN	TRANSPORT LOKAL	VANG SAKU	REPRESENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Perjalanan Dinas ke Pulau Jawa							
	ESELON II a		1,250,000	600,000	800,000	800,000	175,000	
	ESELON II b		1,000,000	600,000	800,000	670,000	125,000	
	ESELON III a		750,000	500,000	750,000	500,000	100,000	
	ESELON III b		750,000	500,000	700,000	400,000		
	ESELON IV		600,000	400,000	600,000	375,000		
	STAF GOLONGAN IV		400,000	350,000	500,000	350,000		
	STAF GOLONGAN III		400,000	350,000	400,000	300,000		
	STAF GOLONGAN II		400,000	350,000	350,000	250,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Perjalanan Dinas ke Luar Pulau Jawa						
	ESELON II a		1,250,000	670,000	800,000	800,000	175,000
	ESELON II b		1,000,000	600,000	800,000	600,000	125,000
	ESELON III a		750,000	500,000	750,000	500,000	100,000
	ESELON III b		750,000	500,000	650,000	400,000	
	ESELON IV		600,000	400,000	600,000	375,000	
	STAF GOLONGAN IV		400,000	350,000	500,000	350,000	
	STAF GOLONGAN III		400,000	350,000	400,000	300,000	
	STAF GOLONGAN II		400,000	350,000	350,000	250,000	
3.	Perjalanan Dinas ke Pulau Sulawesi luar Manado						
	ESELON II a		1,000,000	600,000	800,000	800,000	175,000
	ESELON II b		700,000	600,000	800,000	600,000	125,000
	ESELON III a		700,000	500,000	750,000	500,000	100,000
	ESELON III b		700,000	500,000	650,000	400,000	
	ESELON IV		500,000	400,000	600,000	375,000	
	STAF GOLONGAN IV		400,000	350,000	500,000	350,000	
	STAF GOLONGAN III		350,000	350,000	400,000	300,000	
	STAF GOLONGAN II		300,000	350,000	350,000	250,000	
4.	Perjalanan Dinas ke Manado						
	ESELON II a		900,000	400,000	600,000	500,000	175,000
	ESELON II b		700,000	400,000	550,000	400,000	125,000
	ESELON III a		600,000	300,000	450,000	300,000	100,000
	ESELON III b		600,000	300,000	400,000	250,000	
	ESELON IV		500,000	250,000	350,000	225,000	
	STAF GOLONGAN IV		400,000	200,000	300,000	200,000	
	STAF GOLONGAN III		350,000	200,000	275,000	175,000	
	STAF GOLONGAN II		300,000	200,000	250,000	150,000	
5.	Perjalanan Dinas Ke Tahuna						
	ESELON II a		900,000	400,000	600,000	600,000	175,000
	ESELON II b		700,000	400,000	550,000	500,000	125,000
	ESELON III a		600,000	300,000	450,000	450,000	100,000
	ESELON III b		600,000	300,000	400,000	350,000	
	ESELON IV		500,000	250,000	350,000	300,000	
	STAF GOLONGAN IV		400,000	200,000	300,000	275,000	
	STAF GOLONGAN III		350,000	200,000	275,000	250,000	
	STAF GOLONGAN II		300,000	200,000	250,000	225,000	

C. PERJALANAN DINAS LOKAL

NO.	KECAMATAN	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU
1	2	3	4	5
1.	KECAMATAN MELONGUANE			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
2.	KECAMATAN MELONGUANE TIMUR			
	ESELON II	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
3.	KECAMATAN LIRUNG			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
4.	KECAMATAN KALONGAN			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000

1	2	3	4	5
5.	KECAMATAN MORONGE			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
6.	KECAMATAN SALIBABU			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
7.	KECAMATAN BEO SELATAN			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
8.	KECAMATAN BEO			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
9.	KECAMATAN BEO UTARA			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
10.	KECAMATAN RAINIS			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
11.	KECAMATAN PULUTAN			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
12.	KECAMATAN ESSANG SELATAN			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
13.	KECAMATAN ESSANG			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
14.	KECAMATAN GEMEH			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
15.	KECAMATAN TAMPANAMIMA			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
16.	KECAMATAN KABARUAN			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000
17.	KECAMATAN DAMAU			
	ESELON III	35,000	25,000	50,000
	ESELON IV	35,000	25,000	40,000
	STAF	35,000	25,000	30,000

1	2	3	4	5
18.	KECAMATAN NANUSA			
	ESELON III	35.000	50.000	50.000
	ESELON IV	35.000	50.000	40.000
	STAF	35.000	50.000	30.000
19.	KECAMATAN MANGAS			
	ESELON III	-	-	50.000
	ESELON IV	-	-	40.000
	STAF	-	-	30.000

0. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

(dalam US\$)

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT GOLONGAN					
NO	TUJUAN	PNS GOL IV C	PNS GOL III C	PNS GOL I/A	KETERANGAN
		KEATAS DAN PEJABAT ESELON II	s/d PNS GOL IV B	s/d PNS GOL II/B	
1	2	3	4	5	6
1	<i>Setoran Biaya Uang Harian / Uang Saku.</i>				
	<i>Amerika Utara</i>				
1	Amerika Serikat	473	417	343	Besaran Uang Saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat golongan pejabat / Pegawai pelaksana perjalanan dinas
2	Kanada	404	368	307	
	<i>Amerika Selatan</i>				
2	Argentina	277	242	241	
3	Venezuela	323	287	286	
4	Brazil	341	291	241	
5	Chile	316	270	222	
6	Columbia	281	240	221	
7	Peru	277	237	221	
8	Suriname	295	252	207	- PNS Gol IV B US\$22
9	Ekuador	242	242	241	- PNS Gol I/A s/d PNS Gol IV B US\$22
	<i>Amerika Tengah</i>				
10	Mexico	318	282	281	
11	Kuba	305	261	221	
12	Panama	307	272	271	
	<i>Eropa Barat</i>				
13	Australia	452	312	311	
14	Belgia	419	282	281	
15	Prancis	464	382	381	
16	Rep. Federasi Jerman	411	292	261	
17	Belanda	416	272	271	
18	Swiss	456	322	321	
	<i>Eropa Utara</i>				
19	Denmark	427	275	241	
20	Finlandia	409	354	313	
21	Norwegia	465	288	288	
22	Swedia	436	342	341	
23	Kerajaan Inggris	534	432	431	
	<i>Eropa Selatan</i>				
24	Bosnia Hersegovina	420	334	333	
25	Kroasia	444	353	352	
26	Spanyol	413	287	286	
27	Yunani	373	242	241	
28	Italia	472	372	371	
29	Portugal	382	242	241	
30	Serbia	381	313	277	
	<i>Eropa Timur</i>				
31	Bulgaria	367	320	274	
32	Czech	390	331	273	
33	Hongaria	381	339	300	
34	Polandia	331	313	277	
35	Rumania	381	313	277	
36	Rusia	512	407	406	
37	Slovakia	367	335	287	
38	Ukraina	382	328	290	

1	2	3	4	5
	<i>Afrika Timur</i>			
41	Ethiopia	257	192	167
42	Kenya	276	208	196
43	Madagaskar	244	182	181
44	Tanzania	272	203	182
45	Zimbabwe	244	216	215
46	Mozambique	263	212	211
	<i>Afrika Selatan</i>			
47	Namibia	247	185	161
48	Afrika Selatan	251	202	201
	<i>Afrika Utara</i>			
49	Ajjasair	308	287	286
50	Mesir	275	212	190
51	Maroko	251	192	191
52	Tunisia	241	187	186
53	Sudan	282	210	184
54	Libya	254	189	165
	<i>Asia Barat</i>			
55	Azerbaijan	459	365	364
56	Bahrain	286	222	208
57	Irak	283	220	202
58	Yordania	254	197	196
59	Kuwait	283	257	256
60	Libanon	287	207	186
61	Qatar	276	215	196
62	Arab Saudi	257	200	198
63	Turki	270	210	188
64	Emirat Arab	323	302	301
65	Yaman	211	197	196
66	Saudi Arabia	276	215	201
67	Kesultanan Oman	254	197	185
	<i>Asia Timur</i>			
68	Rep. Rakyat Cina	238	207	206
69	Hongkong	320	287	286
70	Jepang	303	262	261
71	Korea Selatan	326	297	296
72	Korea Utara	238	207	206
	<i>Asia Selatan</i>			
73	Afganistan	226	173	172
74	Bangladesh	196	167	166
75	India	213	242	241
76	Pakistan	203	182	181
77	Sri Lanka	201	157	166
78	Iran	260	201	181
	<i>Asia Tengah</i>			
79	Uzbekistan	352	287	254
80	Kazakhstan	420	334	333
	<i>Asia Tenggara</i>			
81	Filipina	278	222	221
82	Singapura	290	224	221
83	Malaysia	253	212	211
84	Thailand	275	211	201
85	Myanmar	250	197	196
86	Laos	262	202	196
87	Vietnam	265	204	166
88	Brunei Darussalam	256	197	186
89	Kamboja	223	197	196
90	Timor Leste	354	229	196
	<i>Asia Pasifik</i>			
91	Australia	403	272	271
92	Selandia Baru	246	222	221
93	Kaledonia Baru	367	276	224
94	Papua Nugini	352	237	192
95	Fiji	329	221	179



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

: 15 TAHUN 2011

TANGGAL

: 26 OKTOBER 2011

TENTANG

: PEDOMAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2012

A. Transport Perjalanan Dalam Negeri (PP)

NO	JENIS ANGKUTAN	KOTA		KE LAS		KETERANGAN
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	KAPAL LAUT	MELONGUANE	MANADO	1,200,000	750,000	Untuk kota tujuan dalam negeri Uang Transport dalam satuan Rupiah dan untuk kota tujuan luar negeri dalam satuan US\$
2	KAPAL LAUT	MELONGUANE	TAHLINA	2,000,000	1,200,000	
3	PESAWAT	MELONGUANE	MANADO		2,500,000	
4	PESAWAT	MELONGUANE	NAHA		3,000,000	
5	PESAWAT	MANADO	MEDAN	14,540,000	6,840,000	
6	PESAWAT	MANADO	PADANG	13,100,000	6,120,000	
7	PESAWAT	MANADO	PALEMBANG	11,690,000	5,540,000	
8	PESAWAT	MANADO	PEKANBARU	13,140,000	6,170,000	
9	PESAWAT	MANADO	PONTIANAK	12,110,000	5,980,000	
10	PESAWAT	MANADO	SEMARANG	11,690,000	5,470,000	
11	PESAWAT	MANADO	SOLO	11,390,000	5,600,000	
12	PESAWAT	MANADO	SURABAYA	10,290,000	4,920,000	
13	PESAWAT	MANADO	TIMIKA	15,130,000	8,410,000	
14	PESAWAT	MANADO	JOGJAKARTA	9,850,000	5,350,000	
15	PESAWAT	MANADO	JAKARTA	10,000,000	5,000,000	
16	PESAWAT	MANADO	BALIKPAPAN	14,680,000	6,820,000	
17	PESAWAT	MANADO	BANDA ACEH	14,770,000	7,410,000	
18	PESAWAT	MANADO	BANDAR LAMPUNG	10,470,000	4,960,000	
19	PESAWAT	MANADO	BA TAM	12,540,000	6,060,000	
20	PESAWAT	MANADO	BIAK	10,970,000	5,940,000	
21	PESAWAT	MANADO	DENPASAR	7,340,000	4,000,000	
22	PESAWAT	MANADO	JAMBI	11,880,000	5,700,000	
23	PESAWAT	MANADO	JAYAPURA	20,670,000	10,530,000	
24	PESAWAT	MANADO	KUPANG	10,890,000	5,740,000	
25	PESAWAT	MANADO	MAKASSAR	4,980,000	2,720,000	
26	PESAWAT	MANADO	MALANG	12,310,000	5,900,000	
27	PESAWAT	MANADO	MATARAM	8,150,000	4,430,000	
28	PESAWAT	MANADO	PANGKAL PINANG	11,310,000	5,430,000	

B Perjalanan Luar Negeri

1	TUJUAN	BUPATI/WAKIL, KETUA DEWAN/WAKIL	PNS GOL IV/ C KEATAS DAN PEJABAT ESELON II	PNS GOL III/ C sd PNS GOL II/B	PNS GOL IV A sd PNS GOL III/B	KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	
2	3	4	5	6	7	
Amerika Utara						
1	Chicago	7,189	5,488	3,587	3,587	a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Jabatan Ke Luar Negeri dimeruukkan bag pembelian tiket pesawat udara dari Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pulang Pergi (PP) dan belum termasuk tiket pesawat dari melonguane sampai ke Jakarta
2	Houston	7,197	5,494	3,591	3,591	
3	Los Angeles	7,639	4,365	2,853	2,853	
4	New York	10,049	5,742	3,753	3,753	
5	Olawwa	5,374	4,103	3,357	3,357	
6	San Fransisco	7,419	4,240	2,771	2,771	
7	Toronto	2,931	2,238	1,831	1,831	
8	Vancouver	6,721	4,393	2,671	2,671	
9	Washington	11,463	6,550	3,743	3,743	
Amerika Selatan						
10	Bogota	12,348	9,426	7,713	7,713	
11	Brazilia	11,966	9,134	5,970	5,970	
12	Boenos Aires	11,966	9,134	5,970	5,970	
13	Caracas	9,269	8,213	5,130	5,130	
14	Paramaribo	11,772	8,986	7,353	7,353	
15	Santiago de Chile	9,819	7,495	6,133	6,133	
16	Quito	17,310	16,239	12,127	12,127	
Amerika Tengah						
17	Mexico City	7,115	5,432	3,550	3,550	
18	Havana	14,702	11,232	7,335	7,335	
19	Panama City	23,291	14,369	13,570	13,570	
Eropa Barat						
20	Vienna	6,225	3,864	3,357	3,357	
21	Brussels	7,177	4,455	3,870	3,870	
22	Marseilles	6,567	4,076	3,541	3,541	
23	Paris	6,177	3,834	3,331	3,331	
24	Berlin	7,342	4,557	3,959	3,959	
25	Bern	8,076	5,013	4,355	4,355	
26	Bonn	6,960	4,320	3,753	3,753	
27	Hamburg	7,093	4,403	3,825	3,825	
28	Geneva	8,035	4,988	4,333	4,333	
29	Amsterdam	6,177	3,834	3,331	3,331	
Eropa Utara						
30	Copenhagen	6,917	4,294	3,730	3,730	
31	Helsinki	6,826	4,237	3,681	3,681	
32	Stockholm	6,366	3,952	3,433	3,433	
33	London	7,701	4,781	4,153	4,153	
34	Oslo	7,509	4,661	4,049	4,049	
Eropa Selatan						
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033	6,033	
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794	2,794	
37	Athens	14,911	9,256	8,041	8,041	
38	Lisbon	6,274	3,894	3,383	3,383	
39	Madrid	6,733	4,180	3,631	3,631	
40	Rome	7,141	4,433	3,851	3,851	
41	Beograd	9,921	6,158	5,350	5,350	

1	2	3	4	5	6	7
	Eropa Timur					
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771	3,771	
43	Bucharest	7,620	4,734	4,113	4,113	
44	Kiev	9,630	5,978	5,193	5,193	
45	Moscow	9,537	5,920	5,143	5,143	
46	Praque	6,400	3,072	3,451	3,451	
47	Sofia	6,567	4,076	3,541	3,541	
48	Warsaw	6,392	3,968	3,447	3,447	
	Afrika Barat					
49	Dakkar	12,900	9,848	8,555	8,555	
50	Abuja	10,281	7,848	6,818	6,818	
	Afrika Timur					
51	Addis Ababa	7,472	5,704	4,955	4,955	
52	Nairobi	7,966	6,081	5,283	5,283	
53	Antananarive	11,779	8,991	7,811	7,811	
54	Dar Es Salaam	8,645	8,599	5,733	5,733	
55	Harare	8,666	6,615	5,747	5,747	
	Afrika Selatan					
56	Windhoek	11,125	8,645	7,510	7,510	
57	Cape Town	11,053	8,438	7,330	7,330	
58	Johannesburg	5,353	4,066	3,550	3,550	
	Afrika Utara					
59	Algiers	8,610	6,593	5,710	5,710	
60	Cairo	5,361	4,092	3,555	3,555	
61	Kharthoum	5,904	4,107	3,915	3,915	
62	Rabbat	6,205	4,737	4,115	4,115	
63	Tripoli	6,551	4,092	3,555	3,555	
64	Tunisia	8,296	4,806	4,175	4,175	
	Asia Barat					
65	Manama	6,400	5,992	4,700	4,700	
66	Bagdad	5,433	4,148	3,545	3,545	
67	Amman	5,433	4,148	3,545	3,545	
68	Kuwait	4,767	3,639	3,110	3,110	
69	Berut	5,717	4,364	3,730	3,730	
70	Doha	4,207	3,212	2,745	2,745	
71	Damascus	5,096	3,890	3,325	3,325	
72	Ankara	6,641	4,122	3,581	3,581	
73	Abu Dhabi	4,180	3,191	2,727	2,727	
74	Sanaa	5,013	3,827	3,271	3,271	
75	Jedah	4,958	3,785	3,235	3,235	
76	Muscat	6,469	5,156	3,727	3,727	
77	Riyadh	4,598	3,510	3,000	3,000	
	Asia Tengah					
78	Tashkent	13,617	8,453	7,343	7,343	
79	Aslana	13,661	12,089	8,962	8,962	
	Asia Timur					
80	Beejing	2,262	1,868	1,623	1,623	
81	Hongkong	1,719	1,419	1,233	1,233	
82	Osaka	2,572	2,124	1,845	1,845	
83	Tokyo	2,558	2,112	1,835	1,835	
84	Pyongyang	2,421	1,999	1,737	1,737	
85	Seoul	2,421	1,999	1,737	1,737	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 OKTOBER 2011
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2012

CONTOH SURAT TUGAS

Logo daerah

KOP

SURAT SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar

:
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada

- : 1. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

Untuk

- : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DINAS/BADAN.....

NAMA
JABATAN
NIP.

Tembusan Yth.

Om

CONTOH SPPD

Logodaerah

KOP

Lembaran ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S.P.P.D)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Asisten Tata Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pengkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. <i>Jabatan / Instansi</i> c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Muda/lvc b. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Kab. Kepl. Talaud c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Laut/Udara
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di Melonguane	() hari 2011 2011
8.	Pengikut:	
	1.	
	2.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b. APBD
10.	Keterangan lain-lain	

Di keluarkan di :
Pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

